

**FAKTOR KARAKTERISTIK DAN TINGKAT AKUNTABILITAS
PEMERINTAH DALAM PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN KABUPATEN
ACEH TENGAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

NAMA : M. RAJA WIJDAN NST
NPM : 1705170037
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 01 September 2023, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : M. RAJA WIJDAN NST
NPM : 1705170037
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : FAKTOR KARAKTERISTIK DAN TINGKAT AKUNTABILITAS PEMERINTAH DALAM PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN KABUPATEN ACEH TENGAH

Dinyatakan : (A) Lulus Ujian dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tim Penguji

Penguji II

[Signature]
ELIZAR SENEKHA, S.E., M.Si

[Signature]
SRIWATI NAWA, S.E., M.Si

Pembimbing

UMSU
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIC OF INDONESIA

RIYAN ALFIAN, M.Si

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

[Signature]
Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si, CMA



[Signature]
Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : M. RAJA WIJDAN NASUTION
N.P.M : 1705170037
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : FAKTOR KARAKTERISTIK DAN TINGKAT
AKUNTABILITAS PEMERINTAH DALAM
PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN KABUPATEN
ACEH TENGAH

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, 23 Maret 2023

Pembimbing Skripsi

(M. FIRZA ALPI, S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E, M.M, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M. Raja Wijdan Nst
NPM : 1705170037
Dosen Pembimbing : M. Firza Alpi, SE., M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Faktor Karakteristik dan Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Dalam Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Revisi - penulisan / paragraf.	27/7/22	✓
Bab 2	Revisi narasi / penulisan	29/8/22	✓
Bab 3	- Metode / cara	29/8/22	✓
Bab 4	hasil pembahasan.	29/8/22	✓
Bab 5	Kesimpulan.	11/1/23	✓
Daftar Pustaka	Mendaftar.	13/3/23	✓
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Ace Sidiq	28/3/23	

Medan, Maret 2023

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(M. Firza Alpi, SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : **M. RAJA WIJDAN NST**
 NPM : 1705170037
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 Judul Penelitian : **FAKTOR KARAKTERISTIK DAN TINGKAT AKUNTABILITAS PEMERINTAH DALAM PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN KABUPATEN ACEH TENGAH**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



M. RAJA WIJDAN NST

ABSTRAK

FAKTOR KARAKTERISTIK DAN TINGKAT AKUNTABILITAS PEMERINTAH DALAM PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN KABUPATEN ACEH TENGAH

Oleh:

M. Raja Wijdan Nst

Email: mrajawijdan@gmail.com

Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui Faktor Karakteristik Dan Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Dalam Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah. Adapun hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah, terhadap Pengungkapan LKPD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Periode 2016-2021 yang ditunjukkan pada t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($8,616 > 2,776$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil uji hipotesis ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh signifikan Pendapatan Asli Daerah, terhadap Pengungkapan LKPD. Ada pengaruh ukuran (size) terhadap Pengungkapan LKPD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Periode 2016-2021 yang ditunjukkan pada t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($7,206 > 2,776$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil uji hipotesis ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh ukuran (size) terhadap Pengungkapan LKPD. Tidak ada pengaruh ratio kemandirian terhadap Pengungkapan LKPD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Periode 2016-2021 yang ditunjukkan pada t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($1,926 < 2,776$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,087 > 0,05$. Artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil uji hipotesis ini menunjukkan bahwa secara parsial tidak ada pengaruh signifikan ratio kemandirian terhadap Pengungkapan LKPD. Ada pengaruh opini audit terhadap Pengungkapan LKPD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Periode 2016-2021 yang ditunjukkan pada t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($3,887 > 2,776$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,012 < 0,05$. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil uji hipotesis ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh opini audit terhadap Pengungkapan LKPD. Nilai F_{hitung} sebesar 128,347 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000, sedangkan F_{tabel} diketahui sebesar 6,26. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($128,347 > 6,26$) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Ukuran (Size) Pemerintah daerah, Ratio Kemandirian dan Opini Audit secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap terhadap Pengungkapan LKPD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Periode 2016-2021.

Kata Kunci: Karakteristik, Tingkat Akuntabilitas Pemerintah, Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah

ABSTRACT

Characteristic Factors and Level of Government Accountability in Disclosure of Regional Financial Reports at the Central Aceh Regency Financial Management Agency

By:

M. Raja Wijdan Nst

Email: mrajawijdan@gmail.com

The aim of this research is to determine the characteristic factors and level of government accountability in disclosing regional financial reports at the Central Aceh Regency Financial Management Agency. The research results show that there is an influence between Regional Original Income on LKPD Disclosure in the Central Aceh Regency Government for the 2016-2021 period which is shown in the tcount which is greater than ttable ($8.616 > 2.776$) and has a significant number of $0.000 < 0.05$. This means that H_0 is rejected and H_a is accepted. The results of this hypothesis test show that partially there is a significant influence of Regional Original Income on LKPD Disclosure. There is an influence of size on LKPD disclosures in the Central Aceh Regency Government for the 2016-2021 period which is shown in tcount which is smaller than ttable ($7.206 > 2.776$) and has a significant number of $0.000 < 0.05$. This means that H_0 is rejected and H_a is accepted. The results of this hypothesis test show that partially there is an influence of size on LKPD disclosure. There is no influence of the independence ratio on LKPD disclosure in the Central Aceh Regency Government for the 2016-2021 period which is shown in the tcount which is smaller than ttable ($1.926 < 2.776$) and has a significant number of $0.087 > 0.05$. This means that H_0 is accepted and H_a is rejected. The results of this hypothesis test show that partially there is no significant influence of the independence ratio on LKPD disclosure. There is an influence of audit opinion on LKPD disclosures in the Central Aceh Regency Government for the 2016-2021 period which is shown in tcount which is smaller than ttable ($3.887 > 2.776$) and has a significant number of $0.012 < 0.05$. This means that H_0 is rejected and H_a is accepted. The results of this hypothesis test show that partially there is an influence of audit opinion on LKPD disclosures. The Fcount value is 128.347 with a significance level of 0.000, while the Ftable is known to be 6.26. Based on these results, it can be seen that Fcount $>$ Ftable ($128.347 > 6.26$) so that H_0 is rejected and H_a is accepted so it can be concluded that the variables Regional Original Income, Regional Government Size, Independence Ratio and Audit Opinion together have a significant influence regarding LKPD Disclosure to the Central Aceh Regency Government for the 2016-2021 Period.

Keywords: Characteristics, Level of Government Accountability, Disclosure of Regional Financial Reports

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul **“Faktor Karakteristik dan tingkat Akuntabilitas Pemerintah dalam Pengungkapan laporan keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah”** dapat diselesaikan. Pelaksanaan penelitian skripsi ini sedikit mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat kerja keras penulis dan adanya bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan seperti sekarang ini berkat bantuan dari orang-orang yang selama ini telah membantu, mendukung dan membimbing penulis.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Heriadi Nasution dan ibu Zuraina AR yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih, dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan

kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE., M.M., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan SE., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak M.Firza Alpi, SE., M.Si selaku pembimbing yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
8. Bapak/ Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
9. Segenap Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

10. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2017 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
11. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari unsur kesempurnaan. Masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu maupun minimnya pengalaman yang penulis miliki oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan tugas akhir ini.

Semoga segala bentuk bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak dibalas oleh Allah SWT dan semoga tugas akhir ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya. Khususnya pada lingkungan program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Akhir kata, semoga segenap aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dari Ridho dari-Nya. Aaminnn. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, 2023

M. Raja Wijdan Nst

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	11i
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	13
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Identifikasi Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Batasan Masalah	Error! Bookmark not defined.
D.Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
E.Tujuan dan Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB II KAJIAN TEORITIS	Error! Bookmark not defined.
A.Gambaran Umum Perpajakan.....	Error! Bookmark not defined.
B.Perilaku Wajib Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
C.Pelayanan Pajak	Error! Bookmark not defined.
D.Kepatuhan Wajib Pajak	Error! Bookmark not defined.
E. Kajian Terdahulu.....	Error! Bookmark not defined.
F. Kerangka Teoritis	Error! Bookmark not defined.
G. Hipotesis	Error! Bookmark not defined.

BAB III METODE PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Pendekatan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian..	Error! Bookmark not defined.
C. Jenis dan Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
D. Populasi dan Sampel Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Definisi Operasional Variabel	Error! Bookmark not defined.
G. Uji Kualitas Data	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL PENELITIAN	54
A. Hasil Penelitian	54
B. Pembahasan	<u>72</u>
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	77
C. Keterbatasan Penelitian.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Validitas Perilaku Wajib Pajak (X1).....	44
Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Instrumen Pelayanan Perpajakan (X2).....	45
Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak(X3).....	45
Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Instrumen Penerimaan Pajak (Y).....	46
Tabel 3.5 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X1, X2, X3, dan Y.....	47
Tabel 4.1 Skala Likert.....	54
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	55
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	56
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	56
Tabel 4.5 Skor Angket Untuk Perilaku Wajib Pajak (X1).....	57
Tabel 4.6 Skor Angket Untuk Pelayanan Perpajakan (X2)	59
Tabel 4.7 Skor Angket Untuk Perilaku Wajib Pajak (X3).....	61
Tabel 4.8 Skor Angket Untuk Penerimaan Pajak (Y).....	63
Tabel 4.9 Uji Multikolinieritas.....	66
Tabel 4.10 Regresi Linier Berganda	67
Tabel 4.11 Uji t	69
Tabel 4.12 Uji-F.....	71
Tabel 4.13 Koefisien Determinasi	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teoritis	30
Gambar 3.1 Kurva Uji-t	40
Gambar 3.2 Kurva Uji F	41
Gambar 4.1 Uji Normalitas	65
Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisias	67

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau praturan perundangan yang berlaku (Mamesah, 2015).

Keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Di lain pihak, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dalam pelaksanaan keuangan daerah dibutuhkan pencatatan dan pelaporan yang merupakan bagian dari Akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan

daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerahnya dituntut untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangannya agar tercipta pemerintahan yang bersih (Syafitri, 2019).

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, pemerintah Indonesia berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good public governance*). Salah satu upaya konkrit mewujudkan *good public governance* serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, maka baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan (Alamsyah, 2017).

Dalam sektor publik, standar akuntansi yang digunakan adalah SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). SAP sangat penting untuk kepentingan transparansi dan akuntabilitas suatu organisasi publik. (Syafitri, 2019) menyatakan bahwa SAP mengatur mengenai informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan, bagaimana menetapkan, mengukur dan melaporkannya. Pemerintah pusat maupun daerah wajib menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Suhardjanto, 2016). Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah yaitu SAP berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005, laporan keuangan berisi setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik dalam hal pengelolaan keuangan negara. LKPD tersebut bertujuan untuk menyajikan informasi yang relevan dan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban, penilaian kinerja pemerintah, dan sebagai alat pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus berkualitas dan dapat dipahami oleh pengguna sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Penyajian informasi juga harus disertai dengan pengungkapan yang cukup (*adequate disclosure*) yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi tersebut dapat diungkapkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. PP 71 Tahun 2010 lebih lanjut menjelaskan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan dari setiap laporan keuangan dan juga informasi mengenai kebijakan akuntansi, informasi lain yang harus diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, dan ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menjelaskan bahwa salah satu kriteria kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kecukupan pengungkapan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah disajikan sesuai dengan SAP dan melakukan pengungkapan informasi yang cukup. Menurut (Maulana, 2014) tata kelola pemerintahan yang baik merupakan seperangkat prosedur atau proses yang diberlakukan dalam instansi pemerintah untuk

menciptakan harmoni pada pengelolaan dan akuntabilitas operasionalnya. Tata kelola pemerintahan yang baik erat kaitannya dengan bagaimana pemerintah mampu melaksanakan otonomi di daerahnya. (Syafitri, 2019) menyatakan bahwa salah satu upaya konkrit Pemerintah Daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah melalui penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Faktor-faktor pengungkapan laporan keuangan adalah karakteristik pemerintah daerah menurut (Patrick, 2017) meliputi Pendapatan Asli daerah (PAD), ukuran size pemerintah daerah, intergovernmental revenue, belanja daerah, jumlah SKPD, jumlah legislatif, umur pemerintah daerah, differensiasi fungsional, rasio kemandirian.

Namun dalam penelitian ini penulis mengambil faktor pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah pada faktor karakteristik pemerintah daerah yaitu pada pada faktor Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Size (Perusahaan Daerah), *Intergovernmental revenue* dan rasio kemandirian dalam mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan.

Sedangkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk diberikan suatu opini. Menurut Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dalam Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) 300 Standar Pelaporan Pemeriksaan, terdapat lima jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar

tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP DPP), wajar dengan pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan tidak menyatakan pendapat (TMP).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah. Pendapatan berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD diharapkan dapat menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus benar-benar menggali semaksimal mungkin potensi-potensi pendapatan di daerahnya. Sehingga, dalam pelaksanaannya tidak mengalami permasalahan yakni dalam hal pembiayaan. Pendapatan Asli Daerah berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan laba perusahaan daerah termasuk didalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah. Hasil penerimaan ini, daerah memiliki kekuasaan penuh dalam penggunaannya untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan laba perusahaan daerah termasuk di dalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah (Nachrowi, D. N. & Usman, 2016).

Faktor lain pada karakteristik pemerintah daerah yaitu ukuran size (pemerintah daerah). Ukuran pemerintah daerah adalah salah satu variabel dalam besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah yang dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktivitas. Ukuran pemerintah dapat diprosikan sebagai total aset yang dimiliki daerah tersebut dan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan ukuran

pemerintah daerah yang besar, dan pemerintah daerah yang mampu memanfaatkan sumber – sumber potensi daerahnya serta dapat mengelola dengan baik seluruh potensi daerah maka secara tidak langsung pendapatan asli daerah juga dipastikan akan meningkat (Halim, 2014).

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan suatu ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat atau sumber dana eksternal. Dengan catatan, semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah semakin rendah tingkat ketergantungannya pada sumber dana eksternal atau dana dari pemerintah pusat (Halim, 2014).

Rasio kemandirian daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

Penelitian melakukan riset di Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Kabupaten Aceh Tengah yang terletak di tengah-tengah Provinsi Aceh mempunyai posisi dan peran yang sangat strategis. Posisi strategis ini dikarenakan Aceh Tengah berada di Kawasan Ekosistem Leuser yang menjadi paru-paru dunia, disamping Aceh tengah menjadi penghubung beberapa kabupaten di pantai barat selatan Aceh dan kabupaten-kabupaten yang berada di pantai timur Aceh.

Kabupaten Aceh Tengah yang memiliki kewenangan termasuk dalam keuangan, Sehingga Kabupaten Aceh Tengah dapat digunakan sebagai sampel. Penelitian ini dilakukan mulai tahun 2016 hingga tahun 2021 yang mana penelitian ini fokus kepada karakteristik Pemerintahan Daerah dan akuntabilitas untuk

menganalisis apakah faktor-faktor tersebut mempengaruhi pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Aceh Tengah mengenai pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yaitu pemerintah daerah belum sepenuhnya mengungkapkan item pengungkapan wajib dalam laporan keuangannya. Padahal, pengungkapan merupakan salah satu kriteria pemeriksaan atas laporan keuangan, yang dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan. Oleh karena itu kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*) merupakan hal yang sangat penting dalam pemeriksaan untuk memberikan opini atas laporan keuangan.

Hasil pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang masih terbilang rendah membuat peneliti ingin menganalisis lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib LKPD. menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah, ukuran (size) pemerintah daerah, rasio kemandirian serta opini audit.

Mempertimbangkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis lebih lanjut pengaruh karakteristik Pemerintah Daerah dan akuntabilitas terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Masih serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Liestiani (2008), yaitu penelitian ini masih menggunakan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan fokus pada tingkat pengungkapan LKPD dengan metode scoring pada Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Terdapat beberapa perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu Penelitian ini menggunakan butir checklist

pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Butir checklist dalam penelitian ini mencakup semua item yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan yang dibagi dalam lima bagian (detail checklist dapat dilihat pada Lampiran 1), yaitu: (i) penyajian informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah APBD; (ii) ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan; (iii) dasar penyajian laporan keuangan, pengungkapan kebijakan akuntansi keuangan dan penjelasan setiap pos pada laporan keuangan (Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas); (iv) pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan SAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan dan (v) pengungkapan-pengungkapan lainnya.

Penelitian ini menarik dilakukan karena masih jarang nya penelitian mengenai topik pengungkapan laporan keuangan di sektor pemerintah akibat terbatasnya informasi dan data dari pemerintah yang sulit diakses publik, dan cenderung rahasia. Selain itu, motif yang mendasari pengungkapan cenderung sulit untuk dikembangkan, sehingga dalam penelitian ini nantinya akan lebih mengukur ketaatan dibanding pengungkapannya. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah dalam menjalankan pengungkapan laporan keuangan daerahnya. Dengan demikian, penelitian ini akan mengambil judul **“Faktor karakteristik dan tingkat akuntabilitas Pemerintah dalam pengungkapan laporan keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah belum sepenuhnya mengungkapkan item pengungkapan wajib dalam laporan keuangannya.
2. Terjadinya fluktuatif pendapatan asli daerah dan cenderung menurun pada periode 2016-2021
3. Terjadinya fluktuatif ukuran (size) pemerintah daerah dan cenderung menurun pada periode 2016-2021
4. Terjadinya fluktuatif rasio kemandirian pemerintah daerah dan cenderung menurun pada periode 2016-2021

1.3 Batasan Masalah

Batasan permasalahan dari pada faktor-faktor karakteristik pemerintah daerah dalam penelitian ini diprosikan pada faktor pendapatan asli daerah, ukuran (size) pemerintah daerah dan rasio kemandiria, Sedangkan untuk akuntabilitas diprosikan pada opini audit dari BPK RI.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah ukuran (size) pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

3. Apakah rasio kemandirian berpengaruh terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
4. Apakah opini audit berpengaruh terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
5. Apakah pendapatan asli daerah, ukuran (size) pemerintah daerah, rasio kemandirian dan opini audit berpengaruh terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk membuktikan secara empiris pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan permasalahan di atas yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran (size) pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio kemandirian terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh opini audit terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
5. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, ukuran (size) pemerintah daerah dan opini audit terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.6 Manfaat Penelitian

Selain tujuan, penelitian ini juga memiliki manfaat penelitian antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan diharapkan dipakai sebagai wawasan untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh diperkuliahan dan memberikan informasi serta sumbangan studi empiris untuk peneliti selanjutnya yang membahas mengenai karakteristik pemerintah daerah dan akuntabilitas terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai Karakteristik Pemerintah Daerah dan akuntabilitas terhadap tingkat Pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang ada termasuk para pendidik yang ada didalamnya. Dan penentu kebijakan dalam lembaga pendidikan serta pemerintah secara umum.

c. Bagi Ilmu Pengetahuan

Memacu dan mendorong peneliti selanjutnya, untuk meneliti lebih banyak terkait dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah, serta dapat menjadi salah satu sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB 2

LANDASAN TEORITIS

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Pengungkapan LKPD

Kata Pengungkapan (disclosure) memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Menurut (Suhardjanto, 2016) laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas publik menggambarkan kondisi yang komprehensif tentang kegiatan operasional, posisi keuangan, arus kas, dan penjelasan atas pos-pos yang ada di dalam laporan keuangan tersebut.

Penyediaan informasi tersebut untuk kepentingan transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan. Secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda.

Sedangkan (Rahayu, 2014) pelaporan laporan keuangan dilakukan untuk kepentingan:

- 1) Akuntabilitas, berarti mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan,

- 2) Manajemen, dimaksudkan membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat,
- 3) Transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan dan
- 4) Keseimbangan antar generasi, yaitu membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

(Rahayu, 2014) Pengungkapan informasi yang memadai, baik data yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, harus ditekankan pada informasi yang material dan relevan yang dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Pengungkapan harus dapat menambah nilai informasi dan bukan mengurangnya dengan adanya keterangan yang terlalu terinci dan sulit dianalisis. Salah satu komponen pokok dalam laporan keuangan pemerintah adalah Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Pada PP Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan

oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan atau menyajikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
- 2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.
- 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- 4) Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- 5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- 6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Sedangkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan atau menyajikan atau menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- 2) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- 3) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan kebijakankebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- 4) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- 5) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- 6) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah, pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, dan penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya

alam. (Halim, 2014) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Menurut (Mardiasmo, 2019), “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.

Optimalisasi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi Pendapatan Asli Daerah yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, dan mengancam perekonomian. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan sebagai sumber pendapatan untuk menunjang pembangunan di daerah, misalnya pembangunan infrastruktur. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan sebagai alat pengukur kemampuan daerah atas sumber daya yang dapat digali oleh daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karena itu kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diterima daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan

milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2.1.2.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Pasal 157 UU No. 23 Tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

1. Pajak Daerah

Menurut (Mardiasmo, 2019) “pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah seperti provinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya”. Berdasarkan referensi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang ditujukan kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

a. Jenis Pajak Provinsi:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Air Permukaan;
- 5) Pajak Rokok.
- 6) Jenis Pajak Kabupaten/Kota:
 - a) Pajak Hotel;

- b) Pajak Restoran;
- c) Pajak Hiburan;
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g) Pajak Parkir;
- h) Pajak Air Tanah;
- i) Pajak Sarang Burung Walet;
- j) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan;\
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

(Mardiasmo, 2019) mengungkapkan bahwa “untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu diberikan otonomi dan keleluasaan daerah”. Langkah penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah dengan menghitung potensi penerimaan pajak daerah yang sebenarnya dimiliki oleh daerah tersebut, sehingga dapat diketahui peningkatan kapasitas pajak (tax capacity) daerah. Peningkatan kapasitas pajak pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

2. . Retribusi Daerah

Di samping pajak daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar peranannya adalah retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi

atau badan”. Dengan kata lain yang lebih sederhana, retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena menikmati jasa secara langsung atas fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Dari definisi di atas dapat dilihat ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah adalah:

- a. Retribusi dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan daerah.
- b. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan barang atau jasa yang disediakan oleh daerah.

Retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 “mencakup tiga objek yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu”. Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai retribusi jasa usaha, sedangkan retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

a. Retribusi Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta

Catatan Sipil

- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- 10) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
- 11) Retribusi Pelayanan Pendidikan
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- 13) Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta. Jenis retribusi jasa usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Terminal
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 5) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- 6) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 7) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- 8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

9) Retribusi Penyeberangan Air

10) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk mengatur dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 antara lain:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- 3) Retribusi Izin Gangguan
- 4) Retribusi Izin Trayek
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan

Tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik. Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik disuatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan.

2.1.3 Ukuran (Size) Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah (Size) untuk mengetahui besar kecilnya objek dari pemerintah daerah tersebut. Mengetahui ukuran pemerintah daerah salah satunya dengan mengetahui total aset pemerintah daerah. Kerangka Konseptual dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengungkapkan dalam paragraph 65 ayat (a) :

“Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa.”

Ukuran (Size) pada instansi pemerintah dapat dilihat dari total aset, luas wilayah atau jumlah penduduk, tetapi pada umumnya peneliti menggunakan aset mengikuti penelitian yang dilakukan oleh (Setyaningrum, 2015). (Kusumawardani, 2016) menyatakan bahwa “Ukuran yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Selain itu, kemudahan di bidang operasional juga akan memberi kelancaran dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja. “ Size yang besar dapat membantu kegiatan operasional pemerintah daerah yang diiringi dengan meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah daerah yang memiliki ukuran aset besar memiliki tekanan yang besar untuk melakukan pengungkapan atas laporan keuangan.

(Setyaningrum, 2015). menyatakan bahwa “ Hal ini menyebabkan pemerintah daerah yang memiliki ukuran pemerintah daerah yang kecil ukurannya. Sama halnya dengan pendapat (Sumarjo, 2017) menyatakan bahwa “Semakin besar ukuran (size) pemerintah daerah maka akan semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut”. Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran (size) pemerintah daerah adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan besar atau kecilnya pemerintah daerah, semakin besar pemerintah daerah maka semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan total aset sebagai ukuran (size) pemerintah daerah.

2.1.4 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut (Halim, 2014) “Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Menurut (Liestiani, 2018) “Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya”.

Rumus yang dapat digunakan dalam rasio Kemandirian ini menurut (McClave, 2017) adalah : Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan} + \text{Pinjaman}}$$

Menurut (Mardiasmo, 2019), “semakin tinggi rasio kemandirian daerah, maka tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya apabila semakin rendah rasio kemandirian daerah, maka tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pihak eksternal semakin tinggi”.

Menurut Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang dimaksud dengan Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Sedangkan menurut (Halim, 2014) “Pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

2.1.5 Opini Audit

Opini Audit adalah laporan yang di berikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma atau aturan akuntansi disertai dengan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sedang diperiksa (Tobing, R. A., Zuhrotun, 2019). Sebelum auditor memberikan pendapat (opinion), auditor harus melakukan tahapan audit. Tahap-tahap opini audit menurut (Arens, 2016) adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan dan penancangan pendekatan audit
2. Menguji kontrol dan transaksi
3. Penerapan prosedur analitik dan pengujian terperinci atas saldo
4. Penyempurnaan dan penertiban laporan audit

Standar Profesi Akuntan Publik dalam PSA 29 SA Seksi 508 menyebutkan bahwa terdapat lima jenis opini audit (Agoes, 2017), yaitu :

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)

Jika auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar audit yang ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, seperti yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik dan telah mengumpulkan bahan-bahan pembuktian (audit evidence) yang mencakup untuk mendukung opininya, serta tidak menemukan adanya kesalahan material atas penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, maka auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas suatu entitas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (Modified Unqualified Opinion)

Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraph penjelas (atau bahasa penjelas lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor.

3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Unqualified Opinion)

Kondisi tertentu mungkin memerlukan pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi

keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan hal yang dikecualikan.

4. Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion)

Suatu pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Pendapat ini dinyatakan bila menurut pertimbangan auditor laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

5. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion)

Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor dapat tidak menyatakan suatu pendapat jika auditor tidak merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika auditor tidak menyatakan pendapat, auditor harus memberikan semua alasan sesuai dengan substantif yang mendukung pernyataan tersebut.

Pernyataan tidak memberikan pendapat adalah cocok jika auditor tidak melaksanakan audit yang lingkupnya memadai untuk memungkinkan memberi pendapat atas laporan keuangan. Menurut (Tuanakotta, 2017), opini audit dibedakan menjadi modified opinion dan unmodified opinion.

1. Modified opinion

Suatu qualified opinion (pendapat wajar dengan pengecualian), adverse opinion (pendapat tidak wajar), atau disclaimer of opinion (tidak memberi pendapat).

2. Unmodified opinion

Opini yang diberikan auditor ketika ia menyimpulkan bahwa laporan keuangan telah disajikan, dalam segala hal yang material, sesuai kerangka pelaporan keuangan yang diterapkan (the applicable financial reporting framework

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengungkapan LKPD

Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang se sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Halim, 2014) Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (Sari, 2016) berpendapat bahwa kekayaan daerah yang merupakan proksi dari pendapatan asli daerah (PAD) berhubungan positif dengan meningkatnya pengungkapan karena memberikan sinyal dari kualitas kepala daerah, dimana kepala daerah dapat mengambil manfaat dengan meningkatkan kesempatan mereka dipilih kembali dan mengurangi biaya kepentingan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ingram, 2014) menemukan bahwa tingkat kekayaan daerah (PAD) mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan negara bagian Amerika Serikat. Hasil (Hilmi, 2017) menemukan bahwa kekayaan daerah (PAD) berhubungan positif dan signifikan dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, semakin besar pendapatan asli daerah akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan secara lengkap padalaporan keuangannya. Semakin besar kekayaan daerah (PAD), maka semakin besar sumber daya yang dimiliki untuk melakukan pengungkapan sehingga kekayaan daerah meningkat dapat meningkatkan tingkat pengungkapan laporan keuangan.

2.2.2 Pengaruh Ukuran (Size) Pemerintah Daerah terhadap Pengungkapan LKPD

Ukuran pemerintah daerah diproksikan dengan total aset. (Sumarjo, 2017) menggunakan total aset Pemerintah daerah sebagai proksi untuk variabel ukuran Pemerintah daerah karena aset menunjukkan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan dapat diperoleh. (Patrick, 2017)) menemukan bahwa ukuran organisasi berpengaruh positif dan sangat kuat terhadap penerapan sebuah inovasi baru. (Ratnasari, 2016) menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah dalam penelitian ini dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD provinsi. Semakin besar ukuran Pemerintah Daerah maka semakin besar

tuntutan masyarakat untuk menyajikan laporan keuangan pemerintah secara lengkap.

2.2.3 Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pengungkapan LKPD

Rasio kemandirian keuangan daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu Pemerintah Daerah untuk tetap dapat menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa adanya dana perimbangan dari pemerintah pusat (Dwiranda, 2018). Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan semakin tinggi pula tuntutan transparansi atas pengungkapan dan pelaporan keuangan (Dwiranda, 2018). Dengan demikian, semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah maka semakin tinggi pengungkapan yang dilakukan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

2.2.4 Pengaruh Opini Audit terhadap Pengungkapan LKPD

Opini BPK dapat menjadi tolak ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas sebuah entitas pemerintah. Opini ini dapat menaikkan ataupun menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas pelaporan yang disajikan oleh pihak yang diaudit, dalam hal ini entitas pemerintah daerah (Marfiana, N., & Kurniasih, 2018). Opini diberikan oleh BPK sebagai penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah yang bebas dari salah saji. Adanya opini WTP berarti bahwa pemerintah daerah memiliki transparansi dan akuntabilitas yang baik menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya opini tersebut maka Pemerintah daerah akan

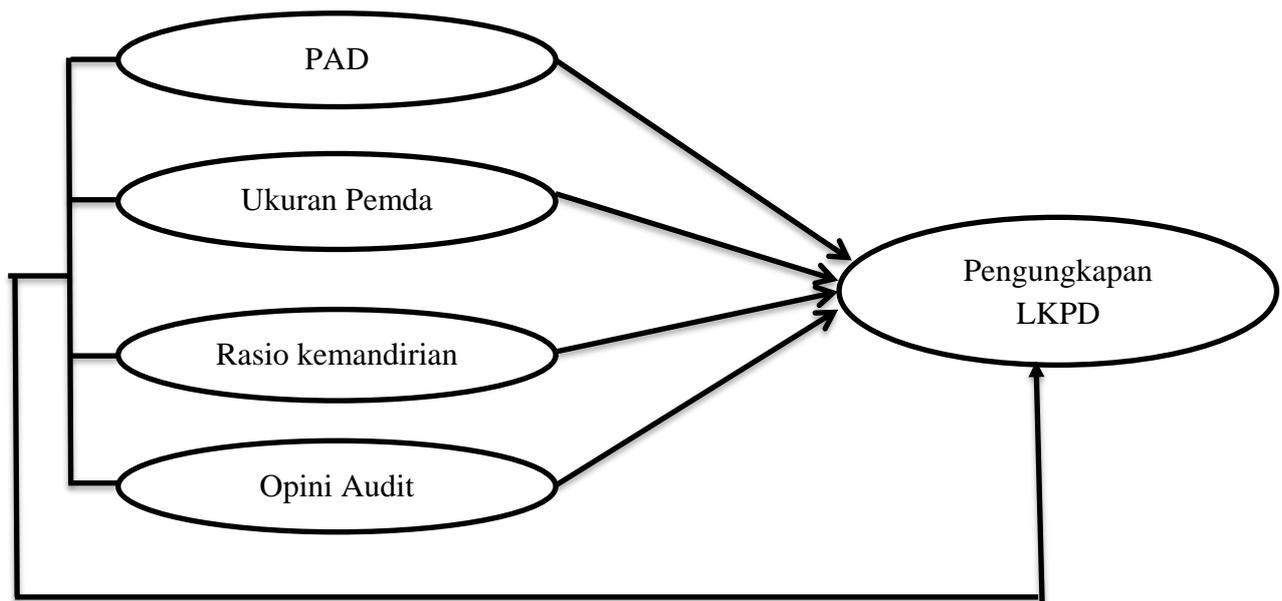
berusaha memberikan penyajian LKPD yang lebih luas untuk memberikan kesan yang baik mengenai kinerja pemerintah daerah tersebut.

Pengungkapan yang lebih dilakukan sebagai upaya perbaikan dan koreksi atas temuan audit yang ditemukan BPK dan menunjukkan pada publik adanya perbaikan kualitas yang dilakukan pemerintah daerah atas saran dari BPK..

2.2.5 Pengaruh PAD, Aset Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian, Opini Audit terhadap Pengungkapan LKPD

Karakteristik pemda adalah karakteristik khusus atau spesifik yang melekat pada pemda, untuk menandai suatu daerah (kabupaten atau kota), dan untuk membedakan dengan pemda satu dengan pemda yang lain (Suhardjanto, 2016). Karakteristik pemda diharapkan mampu menjadi salah variabel yang dapat memengaruhi tingkat ketaatan atau kepatuhan pemda dalam konteks pengungkapan wajib. Oleh karena itu, karakteristik pemda dapat digunakan dalam memprediksi tingkat ketaatan atau kepatuhan pemda terkait pengungkapan informasi yang sifatnya wajib disampaikan pada laporan keuangan. Pada penelitian ini, karakteristik pemda diproksikan dengan Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, rasio Kemandirian.

Sendangkan akuntabilitas laporan keuangan di proksikan pada Opini Audit. Maka dalam penelitian ini semakin baik Pendapatan Asli Derah, Ukuran Pemerintah Daerah, rasio Kemandirian dan Opini Audit maka akan meningkatkan pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Ha : Ada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah
 Ho : Tidak ada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah
2. Ha : Ada pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah
 Ho : Tidak ada pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah
3. Ha : Ada pengaruh rasio kemandirian terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah
 Ho : Tidak ada pengaruh rasio kemandirian terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah

4. Ha : Ada pengaruh opini audit terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah
Ho : Tidak ada pengaruh opini audit terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah
5. Ha : Ada pengaruh pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian dan opini audit secara bersama-sama terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah
Ho : Tidak ada pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian dan opini audit terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah

BAB 3

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian kuantitatif diidentifikasi sebagai proses kerja yang berlangsung secara ringkas, terbatas dan memilah–milih permasalahan menjadi bagian yang dapat diukur atau dinyatakan dalam angka–angka. Penelitian ini dilaksanakan untuk menjelaskan menguji hubungan antar variable menentukan kasualitas dari variable, menguji teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif (untuk meramalkan suatu gejala).

Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivise, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017). Metode ini merupakan salah satu jenis penelitian yang terperinci, sistematis dan terstruktur. Metode penelitian ini memfokuskan pada penggunaan angka. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan tabel, grafik dan diagram sebagai alat ukur untuk menunjukkan hasil data yang didapat.

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian Kuantitatif asosiatif, yaitu penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih, Hubungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hubungan kausal. Hubungan kasual adalah hubungan yang bersifat sebab akibat, yang terdiri dari variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen (variabel

yang dipengaruhi). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh dari variabel, yaitu variabel (X) Pendapatan Asli Daerah, Ukuran (Size) Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian dan Opini Audit terhadap (Y) Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini akan dituangkan pada table di bawah ini:

Tabel 3.1
Defenisi Operasional

Variabel	Deskripsi	Indikator	Skala
Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Pengungkapan laporan keuangan merupakan konsep, metode, dan media untuk menyampaikan informasi laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan. (Suwardjono, 2014:578).	Variabel <i>dummy</i> Bernilai 1 untuk penda sudah sesuai SAP dan nilai 0 untuk penda belum sesuai SAP (Suwardjono, 2014:578).	Nominal
Pendapatan Asli Daerah (X1)	Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, Mardiasmo (2013)	$PAD = HPD + RD + PLPD + LPS$	Nominal

Ukuran (<i>Size</i>) Pemerintah Daerah (X2)	Ukuran (<i>Size</i>) pada instansi pemerintah dapat dilihat dari total aset, luas wilayah atau jumlah penduduk, tetapi pada umumnya peneliti menggunakan aset mengikuti penelitian yang dilakukan oleh Maiyora (2015).	Ukuran (<i>Size</i>) = LN (Total Aset)	Rasio
Rasio Kemandirian (X3)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Halim (2007:5)	Rasio Kemandirian = $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan} + \text{Pinjaman}}$	Rasio
Opini Audit (X4)	Opini Audit adalah laporan yang di berikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma atau aturan akuntansi disertai dengan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sedang diperiksa (Tobing, 2004).	Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy Opini audit going concern (GC) diberi kode 1 sedangkan opini audit non going concern (NGC) diberi kode 0.	Nominal

Sumber data. Olahan penulis dari berbagai sumber

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah dimana laporan keuangannya diambil dari situs resmi acehtengahkab.go.id. Pemilihan lokasi penelitian di Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah karena Kabupaten Aceh Tengah yang memiliki kewenangan termasuk dalam keuangan.

3.3.2 Waktu Penelitian

Proses penelitian dimulai pada Januari 2023 sd April 2023, dengan format sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																	
		Januari				Februari				Maret				April					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Pengajuan Judul	■	■																
2	Riset awal			■	■	■	■												
3	Penyusunan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■						
4	Seminar Proposal													■					
5	Pengumpulan Data													■	■				
6	Pengolahan data													■	■				
7	Penulisan skripsi													■	■	■			
8	Bimbingan skripsi													■	■	■	■		
9	Sidang Meja Hijau													■	■	■	■		

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut (Sugiyono, 2017) menyatakan bahwa “Populasi adalah keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah generalisasi, wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” Populasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan tahunan (*annual report*) tahun 2016-2021.

3.4.2 Sampel

Menurut (Sugiyono, 2017) menyatakan bahwa : “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Untuk menentukan pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu metode pengambilan sampel dengan kriteria yang sudah ditentukan. Berdasarkan Kriteria dapat diambil sampel tahun 2016-2021.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data melalui website resmi Kabupaten Aceh Tengah yaitu situs resmi acehtengahkab.go.id.

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumentasi, dari berbagai dokumen atau berupa arsip data dan pendalaman literatur-literatur seperti buku atau jurnal yang telah dipublikasikan, dan data laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah Periode 2016-2021 dimana data-data tersebut diperoleh dari acehtengahkab.go.id.

3.6 Tehnik Analisis Data

Teknik analisis data ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang akan diteliti apakah masing-masing variabel bebas yaitu pendapatan asli daerah, ukuran (size) pemerintah daerah, ratio kemandirian dan opini audit tersebut

berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah baik secara parsial maupun simultan.

Berikut adalah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda, karena variabel bebas dalam penelitian ini lebih dari satu. Teknik analisis regresi linear berganda merupakan teknik uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel terhadap variabel terikat. Penelitian ini menggunakan data runtut (time series) dengan kurun waktu 6 tahun (dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021).

Menurut (Sugiyono, 2017) Persamaan analisis regresi linier berganda dapat dikemukakan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + \varepsilon$$

Dimana:	Y	= Pengungkapan LKPD
	α	= Konstanta
	b	= Koefisien regresi
	X_1	= Pendapatan Asli Daerah
	X_2	= Ukuran (Size) Pemerintah Daerah
	X_3	= Ratio Kemandirian
	X_4	= Opini Audit
	ε	= Standart error

2. Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah dalam regresi memiliki model yang baik maka perlu dilakukan uji asumsi klasik. Menurut (Sugiyono, 2017) ” uji asumsi klasik regresi berganda bertujuan untuk menganalisis apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian adalah model yang terbaik”. Maka terdapat kriteria-kriteria dalam asumsi klasik, yakni :

a. Uji Normalitas

Untuk melihat variabel terikat dan variabel bebas yang memiliki distribusi normal atau tidak perlu pengujian normalitas. Menurut (Juliandi, A., Irfan, I., & Manurung, 2014) “Pengujian normalitas data yang dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak”. Uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah .

1) Uji kolmogorov smirnov

Uji kolmogorov smirnov adalah uji yang bertujuan agar dalam penelitian ini dapat mengetahui berdistribusi normal atau tidaknya antara variabel independen dengan variabel dependen ataupun keduanya. Uji statistik yang dapat digunakan untuk dapat menguji apakah residual berdistribusi normal adalah uji statistik non parametik kolmogorov smirnov (K-S) dengan membuat hipotesis :

H_0 = Data residual berdistribusi normal

H_a = Data residual tidak berdistribusi normal

Maka ketentuan untuk uji kolmogorov smirnov ini sebagai berikut :

- a) Asymp. Sig (2- tailed) > 0.05 ($\alpha = 5\%$, tingkat signifikan) maka data berdistribusikan normal.
- b) Asymp. Sig (2- tailed) $< 0,05$ ($\alpha = 5\%$, tingkat signifikan) maka data berdistribusikan tidak normal.

2) Uji normal P- Plot of regression standardized residual

Uji ini dapat digunakan untuk melihat model regresi normal atau tidaknya dengan syarat, apabila data mengikuti garis diagonal dan menyebar disekitar garis diagonal tersebut.

- a) Jika data meyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pada distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b) Jika data meyebar jauh dari diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atai grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi klasik.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier ditemukan adanya kolerasi yang tinggi antara variabel bebas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Bila $VIF > 5$ maka terdapat masalah multikolinieritas yang serius.
- b) Bila $VIF < 5$ maka tidak terdapat masalah multikolinieritas yang serius.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan variasi dari residual suatu pengamatan yang

lain. Untuk mengetahui apakah terjadi atau tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini, analisis yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode informal. Metode informal dalam pengujian heteroskedastisitas yakni metode grafik Scatterplot.

Dasar pengambilan keputusan :

- 1) Jika pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik- titik yang menyebar di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode ke- t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi dinamakan adanya problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi.

Salah satu cara mengidentifikasinya adalah dengan melihat nilai Durbin Watson (D-W) :

- a) Jika nilai D-W dibawah -2 , maka ada autokorelasi positif
- b) Jika nilai D-W diantara -2 sampai $+2$ maka tidak ada autokorelasi
- c) Jika nilai D-W di atas -2 , maka ada autokorelasi negatif.

3. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis berguna untuk memeriksa atau menguji apakah koefisien regresi yang didapat signifikan. Ada dua jenis koefisien regresi yang dapat dilakukan yaitu uji t dan uji F.

a. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara individual, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah secara parsial masing-masing variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Setelah didapat t hitung dibandingkan dengan t tabel.

Menurut (Sugiyono, 2017) Rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{r \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Keterangan :

t = nilai t hitung

r = koefisien korelasi

n = banyaknya pasangan rank

Tahap-tahap :

a) Bentuk Pengujian

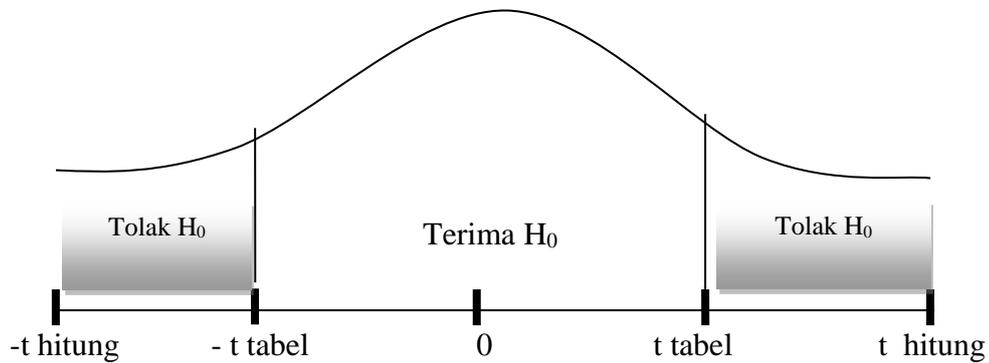
$H_0 : r_s = 0$, artinya tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y)

$H_0 : r_s \neq 0$, artinya terdapat hubungan signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y)

b) Kriteria Pengujian Hipotesis

H_0 diterima jika : $-t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$, pada $\alpha = 5\%$, $df = n-k$

H_0 ditolak jika : $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau $-t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$



Gambar 3.1
Kriteria Pengujian Hipotesis Uji t

b. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas untuk dapat menjelaskan keragaman variabel terikat, serta untuk mengetahui apakah semua variabel memiliki hubungan simultan terhadap variabel terikat atau koefisien regresi sama dengan nol.

Menurut (Sugiyono, 2017) rumus uji F sebagai berikut :

$$F_h = \frac{\frac{R^2}{k}}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan :

F_h = Nilai F hitung

R^2 = Koefisien Korelasi ganda

k = jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota sampel

Bentuk Pengujian

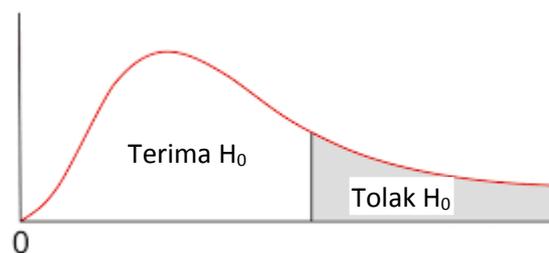
$H_0 = 0$, artinya tidak terdapat hubungan signifikan secara simultan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y)

$H_0 \neq 0$, artinya terdapat hubungan yang signifikan secara simultan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

Kriteria pengujian Hipotesis

H_0 diterima jika $F_{\text{hitung}} \leq F_{\text{tabel}}$ untuk $\alpha = 5$

H_0 ditolak jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ untuk $\alpha = 5$



Gambar III.2
Kriteria Pengujian Hipotesis Uji F

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R-Square adalah untuk melihat bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh variasi nilai variabel bebas. Koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk melihat sejauh mana keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 0 dan 1. Apabila angka koefisien determinasi semakin kuat, yang berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sedangkan nilai koefisien

determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen dalah terbatas.

Koefisien determinasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$D = R^2 \times 100\%$$

Keterangan :

D = Determinasi

R^2 = Nilai Korelasi Berganda

100% = Persentase Kontribusi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data

Didalam penelitian ini variabel-variabel penelitian di klasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu : variabel bebas (variabel independen) dan variabel terikat (variabel dependen). Variabel bebas dalam penelitian ini Pendapatan Asli Daerah, Ukuran (Size) Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian dan Opini Audit terhadap (Y) Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Data yang digunakan dalam perhitungan variabel penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan keuangan pemerintah daerah kabupaten aceh tangah Periode 2016-2021.

1. Pengungkapan LKPD

Pengungkapan laporan keuangan merupakan konsep, metode, dan media untuk menyampaikan informasi laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan (Suwardjono, 2016).

2. Pendapatan Asli Daerah (X1)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

3. Ukuran (Size) Pemerintah Daerah (X2)

Ukuran (Size) pada instansi pemerintah dapat dilihat dari total aset, luas wilayah atau jumlah penduduk, tetapi pada umumnya peneliti menggunakan aset mengikuti penelitian yang dilakukan.

4. Rasio Kemandirian (X3)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Berikut ini disajikan tabulasi dari pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, ukuran (size) pemerintah daerah, rasio kemandirian dan opini audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Periode 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Pendapatan Asli Daerah, Ukuran (Size) Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian, Opini Audit DAN Pengungkapan LKPD Kabupaten Aceh Tengah Periode 2016-2021

No	Tahun	Variabel				
		PAD	Ukuran Size	Rasio Kemandirian	Opini Audit	Pengungkapan LKPD
1	2016	182.654.626.748,55	2.905.295.352.721,09	0,11	1	83%
2	2017	174.466.831.381,00	2.854.457.935.739,45	0,11	1	77%
3	2018	183.064.444.080,00	2.373.204.201.039,29	0,14	1	84%
4	2019	177.490.167.303,00	2.601.315.693.130,22	0,12	1	77%
5	2020	179.676.451.210,00	2.597.257.614.140,20	0,12	1	75%
6	2021	168.257.872.828,00	2.493.238.562.835,00	0,12	1	71%

Sumber: Data Diolah (2023)

Dari data di atas dapat diketahui bahwa PAD tahun 2017 lebih rendah dari tahun sebelumnya, namun pada tahun 2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 pendapatan asli daerah mengalami penurunan namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan dan pada tahun 2021 kembali menurun. Ukuran (size) pemerintah daerah juga mengalami fluktuasi dan cenderung menurun setiap tahunnya. Pada rasio kemandirian adanya peningkatan namun pada tahun 2019-2021 menurun dan cenderung tetap. Pada opini audit BPK RI dari tahun 2016-2021 pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian, namun opini bertolak belakang dengan pengungkapan Laporan LKPD yang masih

rendah, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mengungkapkan item pengungkapan wajib dalam laporan keuangan. Sesuai dengan agensi teori, pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku, kasus tentang tingkat kepatuhan LKPD terhadap ketentuan perundang-undangan masih banyak terjadi di instansi pemerintah daerah.

4.1.2 Uji Asumsi Klasik

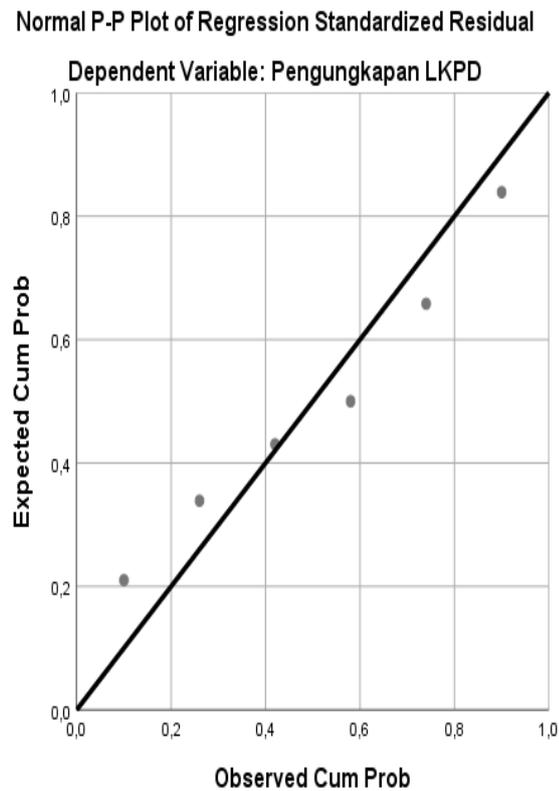
Uji asumsi klasik dilakukan bertujuan untuk memperoleh hasil analisis yang valid. Berikut ini pengujian untuk menentukan apakah kedua asumsi klasik tersebut dipenuhi atau tidak, ada beberapa kriteria persyaratan asumsi klasik yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Dalam menentukan apakah model regresi memenuhi asumsi normalitas digunakan 2 cara antara lain sebagai berikut:

2) P-Plot Regression

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Data yang berdistribusi normal tersebut dapat dilihat melalui grafik p-plot berikut ini:



Gambar 4.1 Uji Normalitas dari Normal P-P Plot Regression Standardized Residual

Pada gambar 4.1 hasil dari pengaruh normalitas data menunjukkan bahwa pada grafik normal plot terlihat titik – titik menyebar mendekati garis diagonal . Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal, sehingga layak digunakan.

3) Kolmogorov Smirnov

Kolmogorov Smirnov memiliki kriteria pengujian sebagai berikut :

- a) Jika nilai signifikan $< 0,05$ berarti data berdistribusi tidak normal.
- b) Jika nilai signifikan $> 0,05$ berarti data berdistribusi normal.

Tabel 4.2
Hasil Uji Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PAD	Ukuran Pemda	Rasio Kemandirian	Opini Audit	Pengungkapan LKPD
N		6	6	6	6	6
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,1683	,1900	,1200	,8267	,7783
	Std. Deviation	,00408	,01387	,01095	,12501	,04916
	Most Extreme Differences					
	Absolute	,492	,502	,333	,196	,234
	Positive	,342	,500	,333	,196	,234
	Negative	-,492	-,574	,181	,171	-,187
Test Statistic		,492	,515	,333	,196	,234
Asymp. Sig. (2-tailed)		,114 ^c	,702 ^c	,136 ^c	,216 ^{c,d}	,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil penelitian SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa nilai K-S variabel Pendapatan Asli Daerah, Ukuran (Size) Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian, Opini Audit dan Pengungkapan LKPD telah berdistribusi secara normal karena masing – masing variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,05.

Nilai masing-masing variabel telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, dan dapat dilihat pada baris *Asym. Sig. (2-tailed)*. Dari baris tersebut nilai *Asym. Sig. (2-tailed)* > 0,05. Ini menunjukkan variabel berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ditemukan adanya korelasi yang tinggi diantara variabel bebas, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Bila $VIF > 5$ maka terdapat masalah multikolineritas yang serius.
- 2) Bila $VIF < 5$ maka tidak terdapat masalah multikolineritas yang serius.

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PAD	,743	1,346
Ukuran Pemda	,643	1,380
Rasio Kemandirian	,610	1,409
Opini Audit	,544	1,355

a. Dependent Variable: Pengungkapan LKPD

Sumber : Hasil Penelitian SPSS 25

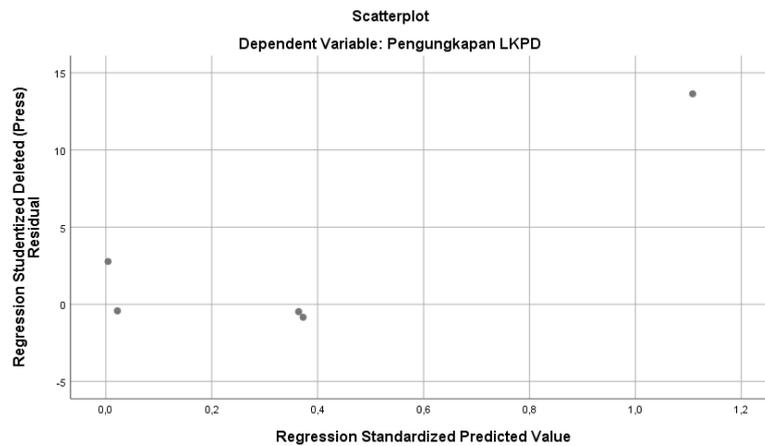
Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa tidak terdapat multikolinearitas masalah karena VIF (*Variabel Inflation Fictory*) lebih kecil dari 5 yaitu pada VIF PAD sebesar 1,346 yang lebih kecil dari 5. Nilai pada dan nilai pada Ukuran Pemda juga lebih kecil dari 5 sebesar 1,380. Nilai VIF pada rasio Kemandirian sebesar 1,409 dan nilai VIF pada opini audit juga lebih kecil dari 5 sebesar 1,355.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan yang lain. Untuk mengetahui apakah terjadi atau tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini, analisis yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode informal. Metode informal dalam pengujian heteroskedastisitas yakni metode grafik Scatterplot.

Dasar pengambilan keputusan :

- 1) Jika pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik- titik yang menyebar diatas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak heteroskedastisitas.



Gambar 4.2
Hasil Uji Heterokedastisitas

Gambar 4.2 memperlihatkan bulatan membentuk pola tidak teratur, dimana titik – titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian tidak terjadi heterokedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode ke- t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi dinamakan adanya problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi.

Salah satu cara mengidentifikasinya adalah dengan melihat nilai Durbin Watson (D-W) :

- 1) Jika nilai D-W di bawah -2, maka ada autokorelasi positif
- 2) Jika nilai D-W diantara -2 sampai +2 maka tidak ada autokorelasi
- 3) Jika nilai D-W di atas +2, maka ada autokorelasi negatif.

Berikut ini merupakan hasil pengujian dengan menggunakan hasil uji autokorelasi pada data yang telah diolah :

Tabel 4.7
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change	DurbinWatson
		F Change	df1	df2		
1	,991	28,347	4	1	,000	1,182

a. Predictors: (Constant), Opini Audit , PAD, Rasio Kemandirian, Ukuran Pemda

b. Dependent Variable: Pengungkapan LKPD

Sumber : Hasil Penelitian SPSS 25

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai Durbin-Watson yang didapat sebesar 1,182 yang berarti nilai D-W berada di antara -2 sampai +2 sehingga dapat disimpulkan bahwa dari angka Durbin Watson tersebut tidak ada autokorelasi .

4.1.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Metode regresi linear berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam satu model. Uji regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran (Size) Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian, dan Opini Audit terhadap Pengungkapan LKPD.

Tabel 4.8
Hasil Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	,214	,143	
PAD	,819	,230	,667
Ukuran Pemda	,738	,119	,533
Rasio Kemandirian	,236	,109	,347
Opini Audit	,514	,632	,458

a. Dependent Variable: Pengungkapan LKPD

Sumber : Hasil Penelitian SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, maka persamaan regresi linear berganda diformulasikan sebagai berikut :

$$Y = 0,214 + 0,819 \text{ PAD} + 0,738 \text{ UP} + 0,236 \text{ RK} + 0,514 \text{ OA}$$

Interpretasi dari regresi diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai konstanta (a) sebesar 0,214 dengan arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa apabila semua variabel independent yaitu Pendapatan Asli Daerah, Ukuran (Size) Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian, dan Opini Audit bernilai nol, maka Pengungkapan LKPD pada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Periode 2016-2021 tetap bernilai 0,214.
- 2) Nilai yaitu Pendapatan Asli Daerah (X_1) sebesar 0,819. Dengan arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa apabila yaitu Pendapatan Asli Daerah ditingkatkan 100% maka Pengungkapan LKPD akan mengalami peningkatan sebesar 0,819 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain bernilai konstan.
- 3) Nilai Ukuran Pemerintah Daerah (X_2) sebesar 0,738. Dengan arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa apabila Ukuran Pemerintah Daerah ditingkatkan 100% maka Pengungkapan LKPD akan mengalami peningkatan sebesar 0,738 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain bernilai konstan.
- 4) Nilai Rasio Kemandirian (X_3) sebesar 0,236. Dengan arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa apabila Rasio Kemandirian ditingkatkan 100% maka Pengungkapan LKPD akan mengalami peningkatan sebesar 0,738 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain bernilai konstan.
- 5) Nilai Opini Audit (X_4) sebesar 0,514. Dengan arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa apabila Opini Audit ditingkatkan 100% maka Pengungkapan LKPD akan mengalami peningkatan sebesar 0,514 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain bernilai konstan.

4.1.4 Pengujian Hipotesis

4.1.4.1 Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara individual, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah secara parsial masing-masing variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Setelah didapat t hitung dibandingkan dengan t tabel.

Kriteria pengambilan keputusan :

- 1) H_0 diterima jika : $-t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$
- 2) H_0 ditolak jika : $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau $-t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$

Untuk uji statistik t penulis menggunakan pengolahan data SPSS *for windows* versi 20 maka diperoleh hasil uji t sebagai berikut :

Tabel 4.6
Hasil Uji t (Parsial)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,214	,143		1,504	,374
PAD	,819	,230	,667	8,616	,000
Ukuran Pemda	,738	,119	,533	7,206	,000
Rasio Kemandirian	,236	,109	,347	1,926	,087
Opini Audit	,514	,632	,458	3,887	,012

a. Dependent Variable: Pengungkapan LKPD

Sumber : Hasil Penelitian SPSS 25

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui nilai perolehan uji-t untuk hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Ukuran (Size) Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian, dan Opini Audit terhadap pengungkapan LKPD. Nilai t_{tabel} untuk $n = 6 - 2 = 4$ adalah 2,776.

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengungkapan LKPD

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap pengungkapan LKPD. Dari pengolahan data SPSS 20, maka dapat diperoleh uji t sebagai berikut :

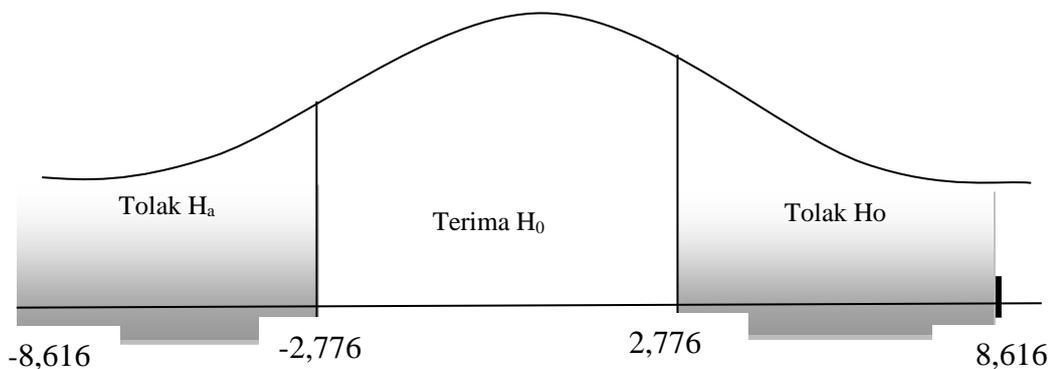
$$t_{hitung} = 8,616$$

$$t_{tabel} = 2,776$$

Dari kriteria pengambilan keputusan :

H_0 diterima jika : $-2,776 \leq t_{hitung} \leq 2,776$ pada $\alpha = 0,05$

H_0 ditolak jika : $t_{hitung} > 2,776$ atau $-t_{hitung} < -2,776$



Gambar 4.3
Kriteria Pengujian Hipotesis Uji t

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh Pendapatan Asli Daerah 8,616 dan t_{tabel} sebesar 2,776. Dengan demikian t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($8,616 > 2,776$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,009 < 0,05$. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pengungkapan LKPD. Nilai t_{hitung} sebesar 8,616 dengan arah hubungan yang positif antara Pendapatan Asli Daerah terhadap

pengungkapan LKPD ini menunjukkan kecenderungan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah diikuti dengan meningkatnya pengungkapan LKPD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenga Periode 2016-2021.

2. Pengaruh Ukuran (Size) Pemerintah Daerah terhadap Pengungkapan LKPD

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Ukuran (Size) Pemerintah Daerah secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap Pengungkapan LKPD. Dari pengolahan data SPSS 25, maka dapat diperoleh uji t sebagai berikut :

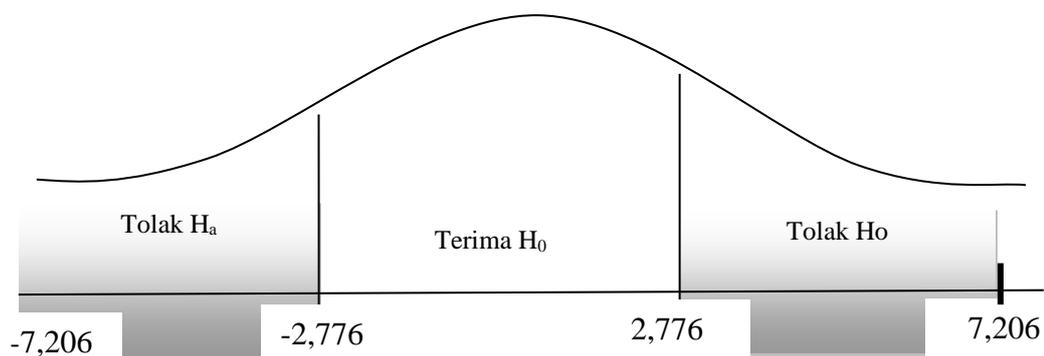
$$t_{hitung} = 7,206$$

$$t_{tabel} = 2,776$$

Dari kriteria pengambilan keputusan :

H_0 diterima jika : $-2,776 \leq t_{hitung} \leq 2,776$ pada $\alpha = 0,05$

H_0 ditolak jika : $t_{hitung} > 2,776$ atau $-t_{hitung} < -2,776$



Gambar 4.3
Kriteria Pengujian Hipotesis Uji t

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh Ukuran Pemda 7,206 dan t_{tabel} sebesar 2,776. Dengan demikian t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($7,206 > 2,776$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya H_0 ditolak dan H_a

diterima, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh Ukuran Pemda terhadap Pengungkapan LKPD. Nilai t_{hitung} sebesar 7,206 dengan arah hubungan yang positif antara Ukuran Pemda terhadap Pengungkapan LKPD. Ini menunjukkan kecenderungan meningkatnya Ukuran Pemda diikuti dengan meningkatnya Pengungkapan LKPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh tengah Periode 2016-2021 .

3. Pengaruh Rasio Kemandirian terhadap Pengungkapan LKPD.

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Rasio Kemandirian secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap Pengungkapan LKPD. Dari pengolahan data SPSS 25, maka dapat diperoleh uji t sebagai berikut :

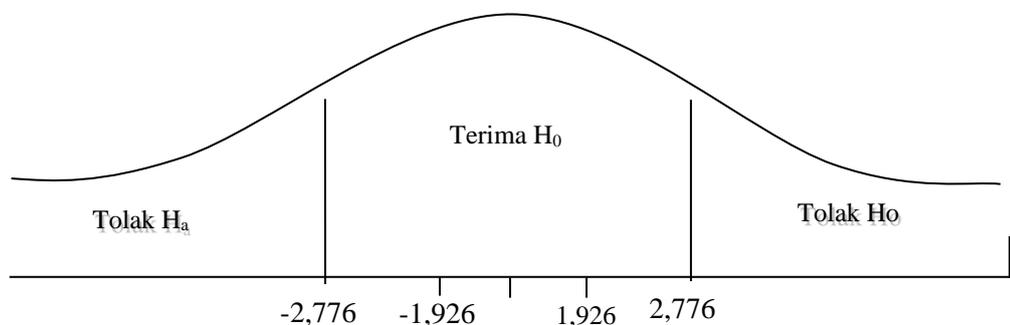
$$t_{hitung} = 1,926$$

$$t_{tabel} = 2,776$$

Dari kriteria pengambilan keputusan :

H_0 diterima jika : $-2,776 \leq t_{hitung} \leq 2,776$, pada $\alpha = 0,05$

H_0 ditolak jika : $t_{hitung} > 2,776$ atau $-t_{hitung} < -2,776$



Gambar 4.4
Kriteria Pengujian Hipotesis Uji t

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh *Firm Size* 1,926 dan t_{tabel} sebesar 2,776. Dengan demikian t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($1,926 < 2,776$) dan

mempunyai angka signifikan sebesar $0,087 > 0,05$. Artinya H_0 diterima dan H_a ditolak, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial tidak ada pengaruh rasio kemandirian terhadap pengungkapan LKPD. Nilai t_{hitung} sebesar 1,926 dengan arah hubungan yang positif antara rasio kemandirian terhadap pengungkapan LKPD ini menunjukkan kecenderungan menurunnya rasio kemandirian diikuti dengan menurunnya pengungkapan LKPD pada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah \ Periode 2016-2021.

4.1.4.2 Uji F (Simultan)

Uji F juga disebut dengan uji signifikan secara bersama-sama dimasukkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah, Ukuran (Size) Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian, dan Opini Audit dalam mempengaruhi terhadap pengungkapan LKPD.

Kriteria pengujian :

Tolak H_0 apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $-F_{hitung} < -F_{tabel}$

Terima H_0 apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $-F_{hitung} > -F_{tabel}$

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS versi 25, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.7
Hasil Uji- F (Simultan)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,812	4	,803	128,347	,000 ^b
	Residual	1,702	1	,741		
	Total	1,012	5			

a. Dependent Variable: Pengungkapan LKPD

b. Predictors: (Constant), Opini Audit , PAD, Rasio Kemandirian, Ukuran Pemda

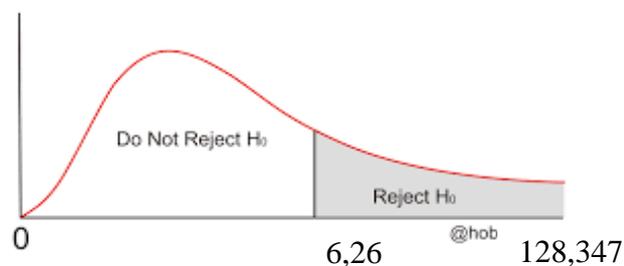
Sumber : Hasil Penelitian SPSS 25

Bertujuan untuk menguji hipotesis statistik diatas, maka dilakukan uji F pada tingkat $\alpha = 5\%$. Nilai F hitung untuk $n = 6$ adalah sebagai berikut :

$$F_{hitung} = 128,347$$

$$F_{tabel} = 6,26$$

Nilai F_{tabel} sebesar 6,26. Selanjutnya nilai F_{hitung} sebesar 128,347 digunakan sebagai kriteria pengambilan keputusan.



Gambar 4.5
Kriteria Pengujian Hipotesis Uji F

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan dengan menggunakan pengujian F_{hitung} dan F_{tabel} . Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran (Size) Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian, dan Opini Audit terhadap pengungkapan LKPD peroleh F_{hitung} sebesar 128,347 dengan F_{tabel} sebesar 6,26 sehingga F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} ($128,347 > 6,26$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,00 < 0,05$. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran (Size) Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian, dan Opini Audit secara bersama-sama terhadap pengungkapan LKPD secara simultan mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD secara langsung.

4.1.5 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk melihat sejauh mana keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Apabila

angka koefisien determinasi semakin kuat, yang berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sedangkan nilai koefisien determinasi (*adjusted R²*) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen adalah terbatas. Berikut hasil pengujian statistiknya

Tabel 4.8
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change	DurbinWatson
						F Change	df1	df2		
1	,996 ^a	,991	,956	,01028	,991	28,347	4	1	,000	1,182

a. Predictors: (Constant), Opini Audit , PAD, Rasio Kemandirian, Ukuran Pemda

b. Dependent Variable: Pengungkapan LKPD

Sumber : Hasil Penelitian SPSS 25

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel di atas, menunjukkan nilai *R Square* adalah 0,991. Untuk mengetahui sejauh mana besaran pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah, Ukuran (Size) Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian, dan Opini Audit secara bersama-sama terhadap Pengungkapan LKPD maka dapat diketahui melalui uji koefisien determinasi seperti berikut ini :

$$\begin{aligned}
 KD &= R^2 \times 100 \% \\
 &= 0,991^2 \times 100 \% \\
 &= 99,1 \%
 \end{aligned}$$

Nilai *R-Square* diatas adalah sebesar 99,1 % hal ini berarti bahwa 99,1 % variasi nilai pengungkapan LKPD ditentukan oleh peran dari variasi nilai Pendapatan Asli Daerah, Ukuran (Size) Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian, dan Opini Audit. Dengan kata lain Pendapatan Asli Daerah, Ukuran (Size) Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian, dan Opini Audit dalam mempengaruhi pengungkapan LKPD adalah sebesar 99,1% sedangkan sisanya 0,9% adalah

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini seperti umur pemda, kekayaan pemda dan lain-lain.

4.2 Pembahasan

Analisis hasil temuan penelitian ini adalah analisis mengenai hasil temuan penelitian ini terhadap kesesuaian teori pendapat maupun penelitian terdahulu yang dikemukakan hasil penelitian sebelumnya serta pola perilaku yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Berikut ini ada 5 (lima) bagian utama yang akan dibahas dalam analisis hasil temuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengungkapan LKPD

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai Pendapatan Asli Daerah terhadap pengungkapan LKPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah Periode 2016-2021 menyatakan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($8,616 > 2,776$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil uji hipotesis ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengungkapan LKPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah Periode 2016-2020.

Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Halim, 2014) Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (Sari, 2016) berpendapat bahwa kekayaan daerah yang merupakan proksi dari pendapatan asli daerah (PAD) berhubungan positif dengan meningkatnya

pengungkapan karena memberikan sinyal dari kualitas kepala daerah, dimana kepala daerah dapat mengambil manfaat dengan meningkatkan kesempatan mereka dipilih kembali dan mengurangi biaya kepentingan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ingram, 2014) menemukan bahwa tingkat kekayaan daerah (PAD) mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan negara bagian Amerika Serikat. Hasil (Hilmi, 2017) menemukan bahwa kekayaan daerah (PAD) berhubungan positif dan signifikan dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, semakin besar pendapatan asli daerah akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan secara lengkap padalaporan keuangannya. Semakin besar kekayaan daerah (PAD), maka semakin besar sumber daya yang dimiliki untuk melakukan pengungkapan sehingga kekayaan daerah meningkat dapat meningkatkan tingkat pengungkapan laporan keuangan.

2. Pengaruh Ukuran (Size) Pemerintah Daerah terhadap Pengungkapan LKPD

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai Ukuran (Size) Pemerintah Daerah terhadap pengungkapan LKPD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Periode 2016-2021 menyatakan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($7,206 > 2,776$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil uji hipotesis ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh ukuran pemda terhadap pengungkapan LKPD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Periode 2016-2021.

Ukuran pemerintah daerah diproksikan dengan total aset. (Sumarjo, 2017) menggunakan total aset Pemerintah daerah sebagai proksi untuk variabel ukuran Pemerintah daerah karena aset menunjukkan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan dapat diperoleh. (Patrick, 2017)) menemukan bahwa ukuran organisasi berpengaruh positif dan sangat kuat terhadap penerapan sebuah inovasi baru. (Ratnasari, 2016) menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah dalam penelitian ini dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD provinsi. Semakin besar ukuran Pemerintah Daerah maka semakin besar tuntutan masyarakat untuk menyajikan laporan keuangan pemerintah secara lengkap.

3. Pengaruh Ratio Kemandirian terhadap Pengungkapan LKPD

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai Ratio Kemandirian terhadap Pengungkapan LKPD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Periode 2016-2021 menyatakan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($1,926 < 2,776$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,087 > 0,05$. Artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil uji hipotesis ini menunjukkan bahwa secara parsial tidak ada pengaruh signifikan Ratio Kemandirian terhadap Pengungkapan LKPD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Periode 2016-2021.

Rasio kemandirian keuangan daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu Pemerintah Daerah untuk tetap dapat menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa adanya dana perimbangan dari pemerintah pusat (Dwiranda, 2018). Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan semakin tinggi pula tuntutan transparansi atas pengungkapan dan pelaporan

keuangan (Dwiranda, 2018). Dengan demikian, semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah maka semakin tinggi pengungkapan yang dilakukan dalam laporan keuangan pemerintah daerah

4. Pengaruh Opini Audit terhadap Pengungkapan LKPD

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai Opini Audit terhadap Pengungkapan LKPD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Periode 2016-2021 menyatakan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,887 > 2,776$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,012 < 0,05$. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil uji hipotesis ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh signifikan Opini Audit terhadap Pengungkapan LKPD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Periode 2016-2021.

Opini BPK dapat menjadi tolak ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas sebuah entitas pemerintah. Opini ini dapat menaikkan ataupun menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas pelaporan yang disajikan oleh pihak yang diaudit, dalam hal ini entitas pemerintah daerah (Marfiana, N., & Kurniasih, 2018). Opini diberikan oleh BPK sebagai penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah yang bebas dari salah saji. Adanya opini WTP berarti bahwa pemerintah daerah memiliki transparansi dan akuntabilitas yang baik menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya opini tersebut maka Pemerintah daerah akan berusaha memberikan penyajian LKPD yang lebih luas untuk memberikan kesan yang baik mengenai kinerja pemerintah daerah tersebut.

Pengungkapan yang lebih dilakukan sebagai upaya perbaikan dan koreksi atas temuan audit yang ditemukan BPK dan menunjukkan pada publik adanya perbaikan kualitas yang dilakukan pemerintah daerah atas saran dari BPK..

5. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran (Size) Pemerintah daerah, Ratio Kemandirian dan Opini Audit terhadap Pengungkapan LKPD

Hasil penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran (Size) Pemerintah daerah, Ratio Kemandirian dan Opini Audit terhadap Pengungkapan LKPD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Periode 2016-2021. Berdasarkan uji ANOVA (*Analysis Of Variance*). Pada tabel diatas didapat F_{hitung} sebesar 128,347 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000, sedangkan F_{tabel} diketahui sebesar 6,26. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($128,347 > 6,26$) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Ukuran (Size) Pemerintah daerah, Ratio Kemandirian dan Opini Audit secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap Pengungkapan LKPD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Periode 2016-2021.

Karakteristik pemda adalah karakteristik khusus atau spesifik yang melekat pada pemda, untuk menandai suatu daerah (kabupaten atau kota), dan untuk membedakan dengan pemda satu dengan pemda yang lain (Suhardjanto, 2016). Karakteristik pemda diharapkan mampu menjadi salah variabel yang dapat memengaruhi tingkat ketaatan atau kepatuhan pemda dalam konteks pengungkapan wajib. Oleh karena itu, karakteristik pemda dapat digunakan dalam memprediksi tingkat ketaatan atau kepatuhan pemda terkait pengungkapan informasi yang sifatnya wajib disampaikan pada laporan keuangan. Pada penelitian ini,

karakteristik pemda diproksikan dengan Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, rasio Kemandirian.

Sendangkan akuntabilitas laporan keuangan di proksikan pada Opini Audit. Maka dalam penelitian ini semakin baik Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, rasio Kemandirian dan Opini Audit maka akan meningkatkan pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kesimpulan dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran (Size) Pemerintah daerah, Ratio Kemandirian dan Opini Audit terhadap Pengungkapan LKPD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Periode 2016-2021, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah, terhadap Pengungkapan LKPD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Periode 2016-2021 yang ditunjukkan pada t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($8,616 > 2,776$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil uji hipotesis ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh signifikan Pendapatan Asli Daerah, terhadap Pengungkapan LKPD.
2. Ada pengaruh ukuran (size) terhadap Pengungkapan LKPD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Periode 2016-2021 yang ditunjukkan pada t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($7,206 > 2,776$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil uji hipotesis ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh ukuran (size) terhadap Pengungkapan LKPD
3. Tidak ada pengaruh ratio kemandirian terhadap Pengungkapan LKPD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Periode 2016-2021 yang ditunjukkan pada t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($1,926 < 2,776$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,087 > 0,05$. Artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil uji hipotesis ini

menunjukkan bahwa secara parsial tidak ada pengaruh signifikan ratio kemandirian terhadap Pengungkapan LKPD

4. Ada pengaruh opini audit terhadap Pengungkapan LKPD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Periode 2016-2021 yang ditunjukkan pada t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($3,887 > 2,776$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,012 < 0,05$. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil uji hipotesis ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh opini audit terhadap Pengungkapan LKPD
5. Nilai F_{hitung} sebesar 128,347 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000, sedangkan F_{tabel} diketahui sebesar 6,26. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($128,347 > 6,26$) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Ukuran (Size) Pemerintah daerah, Ratio Kemandirian dan Opini Audit secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap terhadap Pengungkapan LKPD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Periode 2016-2021

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Periset berikutnya diharapkan mengkaji pengungkapan informasi finansial pemerintah daerah yang memang sudah mempraktikkan dasar akrual, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010 sehingga evaluasi pengungkapannya akan lebih seimbang.
2. Sebagian keterbatasan dalam riset ini yang diharapkan bisa diperbaiki pada riset berikutnya, ialah: hasil riset ini membuktikan jika pengungkapan

informasi finansial pemerintah daerah di kabupaten Aceh tengah belum sempurna.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lainnya yang memiliki kemungkinan untuk berpengaruh tingkat pengungkapan, seperti size (ukuran daerah), diferensial fungsional atau karakteristik pemerintahan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan LKPD dalam penelitian ini hanya terdiri dari 4 variabel, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Ukuran (Size) Pemerintah daerah, Ratio Kemandirian dan Opini Audit sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan LKPD seperti umur pemerintah daerah, jumlah OPD, ukuran legislatif, kekayaan daerah dan lain sebagainya.
2. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan data keuangan pemerintah daerah yaitu terkadang sangat sulit mendapatkan laporan keuangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2017). *Auditing : Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh. Akuntan Publik , Buku 1, Edisi 5*. Salemba Empat.
- Alamsyah. (2017). *Mekanisme Pengawasan APBD di Kabupaten Sleman*. Universitas Gajah Mada.
- Arens, A. A. (2016). *Jasa Audit dan Assurance. Edisi 14*. Salemba Empat.
- Dwiranda. (2018). *Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2012-2016*. Skripsi Universitas Udayana Bali.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik, Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Salemba Empat.
- Hilmi, M. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. *E-Jurnal Akuntansi*, 13(2), 1–10.
- Juliandi, A., Irfan, I., & Manurung, S. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. UMSU Press.
- Kusumawardani. (2016). *Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Fakultas Ekonomi UNNES.
- Liestiani, A. (2018). *Pengungkapan LKPD Kab/Kota di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2016*. FEUI.
- Mamesah, D. J. (2015). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Marfiana, N., & Kurniasih, L. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah/Kota. *Jurnal Akuntansi Universitas Sebelas Maret*, 14(2), 150–182.
- Maulana, A. E. (2014). *Kepemimpinan Transformasional dalam Birokrasi Pemerintahan*. Multicerdas Publishing.
- McClave, & J. T. (2017). *Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga.
- Nachrowi, D. N. & Usman, H. (2016). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Lembaga Penerbit FEUI.
- Patrick, P. A. (2017). *The Determinant of Organizational Inovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government*. The Pennsylvania

State University.

- Rahayu, et al. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau (Studi Empiris Pada SKPD. *JOM Fekon*, 1(1), 1–10.
- Ratnasari, A. D. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK RI Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Periode 2012- 2014). *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 1–25.
- Sari, P. (2016). *Jurnal Ilmiah “Pengaruh DanaAlokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung”, Sumatera Utara : Universitas Sumatera Utara*. USU Press.
- Setyaningrum, D. (2015). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154–170.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta.
- Suhardjanto, & L. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Pengungkapan Wajib di Indonesia. *Prestasi*, 6(2), 1–11.
- Sumarjo, H. (2017). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Suwardjono. (2016). *Pengungkapan dan Sarana Interpretatif*. Edisi. Ketiga. BPF. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Syafitri, E. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 2(1), 36–47.
- Tobing, R. A., Zuhrotun, & R. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan Sustainability Report pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 102–123.
- Tuanakotta, T. M. (2017). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.